

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL**

YOUTH PARTICIPATION IN SOCIAL FOREST MANAGEMENT

ANDI ATIRA ILFA



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

PERAN PEMUDA DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ATIRA ILFA

P022181017

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS**PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ATIRA ILFA
Nomor Pokok P022181017

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 10 September 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. Dr. Ir. H. Supratman, MP.
Ketua

Dr. forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Atira Ilfa
Nim : P022181017
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Konsentrasi : Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 September 2020

Yang membuat pernyataan



ANDI ATIRA ILFA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Rabb yang tiada berhak untuk dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Atas rahmat-Nya berupa nikmat kehidupan, ilmu, iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial*".

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk bantuan baik materil maupun moril, selama penulis menempuh jenjang Pendidikan di Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dengan penuh hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, MP** dan Bapak **Dr. forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mencurahkan tenaga, masukan pemikiran serta arahan hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.**, Bapak **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.**, dan Bapak **Drs. Hasbi M.Si. Ph.D** sebagai penguji yang telah banyak memberikan saran maupun koreksi dalam penyelesaian tesis ini.
3. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku rektor Universitas Hasanuddin dan **Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

terhadap seluruh staf pengajar dosen program Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan Pemuda yang telah



mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis, serta staf pegawai Sekolah Pascasarjana, terimakasih atas pelayanan yang diberikan demi kelancaran administrasi.

5. Rekan-rekan mahasiswa Manajemen Kepemimpinan Pemuda Angkatan 2018, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan telah banyak memberikan pelajaran bagi penulis.
6. Saudara-saudara dari Forester 2010 unhas yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Perangkat Desa dan Masyarakat desa Kahayya Khususnya Para Ketua Kelompok Tani, atas kesediaan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa yang tulus kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi dan mengasihi.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki dalam pembuatan tesis ini yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 10 September 2020

Andi Atira Ilfa



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Lingkup pembahasan	7
Lingkup Wilayah.....	8
.....	9



TINJAUAN KONSEP	9
A. Definisi Partisipasi Masyarakat.....	9
B. Pemuda	15
C. Perhutanan Sosial.....	16
D. Hutan Kemasyarakatan.....	17
E. <i>Force Field Analysis</i>	19
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Kerangka Konsep	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel	27
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30
1. Menganalisis Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm30	
2. Menganalisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm dan Merusmuskan Strategi Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm.....	32
F. Defenisi Operasional	35
BAB IV.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
Gambaran Umum.....	37
Desa Kahayya.....	37
Kondisi Areal Kerja Kelompok Tani HKm	38



B. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm.....	43
1. Perencanaan.....	46
2. Pelaksanaan	49
3. Evaluasi	50
C. Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).	51
1. Faktor Pendorong.....	53
2. Faktor Penghambat.....	59
D. Strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).	62
BAB V.....	66
KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2. Variabel, kriteria dan indikator pencapaian kategori partisipasi	31
Tabel 3. Faktor faktor pendorong dan penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	33
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Kahayya Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 5. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm	46
Tabel 6. Tingkat partisipasi pemuda dalam tahap perencanaan HKm	47
Tabel 7. Tingkat partisipasi pemuda dalam pelaksanaan HKm.....	49
Tabel 8. Tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm pada kegiatan Evaluasi (Pembuatan dan Penyampaian Laporan).	51
Tabel 9. Faktor-faktor pendorong (driving force) dan faktor-faktor penghambat (restraining force) partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm.	52
Tabel 10. Strategi memperkuat faktor pendorong partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm.	63
Tabel 11. Cara memperlemah faktor penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm.	64
Tabel 12. Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm di Desa Kahayya.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein	14
Gambar 2. Analisis Medan Kekuatan.....	19
Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian	25
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian.....	27
Gambar 5. Force Field Analysis.....	33
Gambar 6. Peta Areal Kerja Kelompok Tani HKm di Desa Kahayya	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Kuisisioner) Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan HKm.....	74
Lampiran 2. Data Responden Penelitian.....	79
Lampiran 3. Rekapitulasi Analisis Tingkat/Derajat Partisipasi Pemuda	80
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.	86



ABSTRACT

ANDI ATIRA ILFA. Youth Participation in Social Forest Management (supervised by **Supratman** and **Muhammad Alif K.S.**)

This study aims to (1) analyze the level of youth participation in community forest (HKm) management, (2) analyze the driving forces and restraining forces of youth participation in community forest management and (3) formulate strategies for increasing youth participation in community forest management.

The data obtained were identified and reviewed in the form of a frequency table of Arnstein's degree of involvement, then analyzed descriptively by the Forces Field Analysis and Focus Group Discussion methods.

The results show that the level of youth participation is at the degree of non-participation, with a percentage of 71.43%. The factors that encourage youth participation consist of the group facilitator, group meetings, work plan documents, assistance from various parties, the formation of the Social Forestry Business Group (KUPS), and the desire of the youth to participate. The factors that inhibit youth participation consist of lack of youth knowledge in managing community forest, not yet implementing work boundary arrangement activities, youth are not involved in the process of making work plans, and community forest implementation is still carried out individually, the farming experience is still lacking, lack of group capital makes the price of raw materials unstable. An appropriate strategy for increasing youth participation in the management of community forest consists of Conducting meetings involving facilitator, farmer groups and youth to discuss the implementation of management activities (planning, implementation & evaluation) of the community forest-conduct socialization and meetings regarding the contents of the community forest documents that have been made. It needs to make internal group rules regarding producing sales prices, enhance the role of KUPS and conduct training for KUPS administrators to increase their capacity. It also needs to involve youth participating in various types of training conducted by government and non-government organizations (NGOs).

Keywords: Youth Participation, Social Forest Management, Community Forest, strategies for increasing participation



Optimization Software:
www.balesio.com



ABSTRAK

ANDI ATIRA ILFA. Partisipasi Pemuda dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial (dibimbing oleh Supratman dan Muhammad Alif K.S.).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm, (2) menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm dan (3) merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm.

Data yang diperoleh diidentifikasi dan dikaji dalam bentuk tabel frekuensi derajat partisipasi Arnstein, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode *Forces Field Analysis* dan *Focus Group Discussion*.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi pemuda berada pada derajat partisipasi *non-participation* dengan persentase 71,43%. Faktor pendorong partisipasi pemuda terdiri atas: adanya pendamping kelompok, pertemuan kelompok, dokumen rencana kerja, bantuan dari berbagai pihak, terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan keinginan pemuda untuk berpartisipasi. Faktor penghambat partisipasi pemuda terdiri atas: kurangnya pengetahuan pemuda dalam pengelolaan HKm, belum terlaksananya kegiatan penataan batas arel kerja, pemuda tidak dilibatkan dalam proses pembuatan rencana kerja, pelaksanaan HKm masih dilakukan sendiri-sendiri, pengalaman bertani masih kurang, modal kelompok tidak ada mengakibatkan harga jual bahan baku tidak stabil. Strategi yang sesuai dalam peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm terdiri atas: Melakukan pertemuan yang melibatkan pendamping, kelompok tani dan pemuda untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan & evaluasi) HKm. melakukan sosialisasi dan rapat mengenai isi dokumen rencana kerja HKm yang telah dibuat. Membuat aturan internal kelompok mengenai harga penjualan produk. Meningkatkan peran KUPS dan melakukan pelatihan bagi pengurus KUPS untuk meningkatkan kapasitasnya. Pemuda ikut serta dalam berbagai jenis pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah (LSM).

Kata kunci: Partisipasi pemuda, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Strategi Peningkatan Partisipasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting sebagai penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pengelolaan hutan secara lestari adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (*community based development*). Salah satu wujud dari pembangunan berbasis masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah dengan adanya skema Perhutanan Sosial. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 mendefinisikan bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan daya masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Saat ini ada lima skema pengelolaan dalam Perhutanan Sosial



yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Pengembangan Perhutanan Sosial yang melibatkan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk turut serta dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang ada, diharapkan mampu memberi dampak positif bagi kawasan hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya program perhutanan sosial yang diciptakan pemerintah sebagai solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan (*pro job*), mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan (*pro poor*), meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi dalam bidang kehutanan (*pro growth*), serta mempercepat rehabilitasi dan perbaikan mutu lingkungan (*pro environment*).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan skema perhutanan sosial dalam hutan negara yang bertujuan agar masyarakat dapat diberdayakan dalam pengelolaan hutan, yang dikelola secara lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, menerangkan bahwa Hutan Kemasyarakatan yang disingkat HKm, adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, selanjutnya dijabarkan pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian

kat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam



rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui HKM dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan masyarakat, pemuda merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa. Dhanani *et al.* (2009) berpendapat bahwa pemuda merupakan sumber daya potensial dan generasi penerus yang menjadi aktor kunci perubahan dalam masyarakat. Pengelolaan hutan secara lestari tentunya tidak boleh dilepaskan dari partisipasi pemuda. Partisipasi merupakan keterlibatan individu atau masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Salah satu bentuk partisipasi pemuda dalam pengelolaan hutan yaitu tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam. Rosida (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa partisipasi pemuda dalam mengembangkan potensi desa berupa Gunung Api Purba Nglanggeran menjadi Kawasan ekowisata dapat dikatakan aktif dan telah berhasil digunakan dan mengangkat citra desa pada tingkat Kabupaten, Provinsi, bahkan Internasional. Prasaja & Saryani (2018) menemukan bahwa



partisipasi pemuda pada pengelolaan Wisata Alam Kalibiru ada pada tingkatan tokenism (rendah). Tingkat partisipasi pemuda dapat ditingkatkan dengan mulai melibatkan mereka di dalam kepengurusan (Prasaja & Saryani, 2018). Namun saat ini, penilaian tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan perhutanan sosial khususnya hutan kemasyarakatan masih belum dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Samsu (2018) di desa Kahayya, menunjukkan golongan petani miskin sebesar 34% dan menengah 45%. Hal ini menunjukkan masih banyaknya petani yang termasuk dalam golongan kategori miskin, dan perlu ada solusi yang tepat agar mampu mengatasi kemiskinan di Desa Kahayya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.363/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011, menetapkan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas \pm 2.265 ha di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) terhadap Kelompok Tani Hutan yang telah terbentuk, salah satunya berada di Desa Kahayya Kecamatan Kindang. Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbentuk sebanyak 4 kelompok, dengan luas lahan sebesar 390 ha, dengan jumlah anggota sebanyak 122 orang. Pemberian izin kepada kelompok tani ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal. Berdasarkan data dari

erian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil evaluasi HKm di
en Bulukumba pada kinerja produksi atau ekonomi hanya 25 %, hal ini



menunjukkan ada faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja HKm pada sektor produksi.

Yuliana (2007) menentukan golongan umur petani hutan yaitu dewasa awal (18-35 tahun), dewasa pertengahan (36-50 tahun) dan dewasa akhir (>50 tahun). Menurut Masjud (2000) pada kisaran umur dewasa akhir (>50 tahun), petani hutan mencapai kematangan dalam bertani karena sudah ditekuni sejak usia muda, dan termasuk umur produktif. Akan tetapi pada golongan umur dewasa akhir, petani hutan sulit menerima atau mengadopsi kemajuan teknologi baru, misalnya alat komunikasi dan alat pertanian yang menggunakan mesin (Winata dan Yuliana, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan Winata dan Yuliana (2012) terhadap partisipasi petani hutan dalam pengelolaan hutan, golongan umur pemuda pada dewasa awal 18-35 tahun masih sangat minim yaitu 4%, nilai tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi pemuda dalam pengelolaan hutan, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan tujuan pembentukan perhutanan sosial dalam hal penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Pemuda sebagai generasi penerus dan memiliki kapasitas untuk menyerap informasi dan teknologi lebih baik, harusnya terlibat aktif dalam proses pengelolaan hutan agar program pemerintah pada Perhutanan Sosialnya HKm dapat berhasil. Hal tersebut menjadi dasar acuan peneliti melakukan penelitian mengenai partisipasi pemuda dengan umur 16-30



tahun, dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemuda terhadap pengelolaan Perhutanan Sosial di Hutan Kemasyarakatan khususnya Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba.



2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemuda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba.
3. Merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan menjadi referensi dan acuan untuk penelitian lanjutan terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda didalam bidang kehutanan.
2. Terhadap pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam perencanaan program pemberdayaan pemuda dan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan khususnya pada skema Perhutanan Sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini, adalah:

1. Lingkup pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini ditekankan pada strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di

Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Sebelum strategi peningkatan disusun, dilakukan analisis tingkat partisipasi pemuda



dalam pengelolaan HKm, kemudian dilakukan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm. Setelah itu, disusun strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan HKm di Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba.

2. Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian berada di Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.



BAB II

TINJAUAN KONSEP

A. Definisi Partisipasi Masyarakat

Sumaryadi (2005) mengemukakan bahwa partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Rochmayanto, *et al.* (2006) berpendapat partisipasi merupakan sumber daya sosial yang sangat berperan besar dalam menyukseskan suatu program pembangunan pedesaan. Partisipasi menurut Awang (2003), merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, seperti (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber dayanya, (b) pelaksanaan program/proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program/proyek. Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi merupakan segala bentuk keterlibatan individu maupun masyarakat secara sukarela, berupa pikiran maupun tindakan dalam proses pembangunan, dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, seperti mengemukakan oleh Conyers (1991), Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,



kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Isbandi (2007) memandang bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Prinsip-prinsip partisipasi yang tertulis dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Departement for International Development (DFID) (Sumampouw, 2004), yaitu Cakupan Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*), Transparansi, Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*), Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), Pemberdayaan (*Empowerment*) dan Kerjasama.

Soelaiman (1980), berpendapat, ada empat faktor eksternal (luar) yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:



1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat dengan pimpinannya serta sistem sosial di masyarakat dengan sistem luarnya.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Sementara itu, Sastropoetro (1986) seperti yang dikutip Nurwanda (2018), mengemukakan dimensi partisipasi masyarakat terdiri dari: 1. Pikiran (*Psychological Participation*); 2. Tenaga (*Physical Participation*); 3. Keahlian (*Participation with Skill*); 4. Barang (*Material Participation*); dan 5. Uang (*Money Participation*). Kemudian Sulistiyorini *at al*, (2015) menjabarkan pendapat Hamijoyo (2007) mengenai jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk



mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
4. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Arnstein (1969) dalam Rosyda dan Nasdian (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

Nasdian (2014) dalam bukunya menjelaskan kedelapan tangga partisipasi

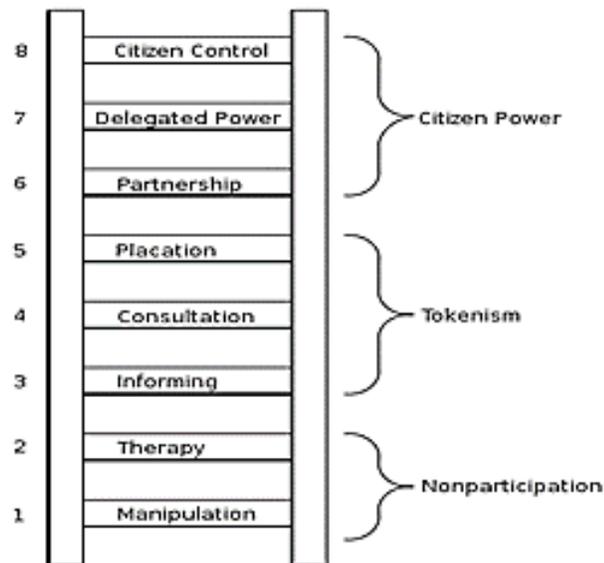
dengan penjelasan sebagai berikut:



1. *Manipulation* (manipulasi), dimana partisipasi hanya sebagai formalitas semata dan masyarakat diikutsertakan sebagai “stampel karet” dalam badan penasihat.
2. *Therapy* (terapi), dimana ketidakberdayaan masyarakat dianggap sebagai penyakit sehingga keterlibatan masyarakat hanya bertujuan untuk menghilangkan “luka”-nya saja dan bukan menemukan penyebab “luka”- nya,
3. *Informing* (menginformasikan), yaitu pemberian informasi kepada masyarakat akan hak, tanggungjawab, dan pilihan mereka. Namun seringkali pemberian informasi ini bersifat satu arah sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kekuatan untuk melakukan negosiasi. Pemberian informasi ini biasanya melalui media seperti pamflet atau poster.
4. *Consultation* (konsultasi), merupakan bentuk partisipasi semu dimana masyarakat mulai diminta pendapatnya melalui forum jajak pendapat dan pertemuan warga. Tetapi pemegang kekuasaan tetap yang mengambil keputusan, karena partisipasi ini hanya diukur dari frekuensi kehadiran masyarakat dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa pulang, dan seberapa banyak kuesioner yang dijawab.
5. *Placation* (menenangkan), dimana masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh dengan memberi masukan dan mengusulkan rencana, tetapi keputusan tetap dipegang oleh pemangku kekuasaan.



6. *Partnership* (kemitraan), dimana kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggungjawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
7. *Delegated power* (kekuasaan yang didelegasikan), pada tingkatan ini masyarakat menduduki mayoritas kursi sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Perbedaan-perbedaan dengan pemegang kekuasaan diatasi dengan melakukan tawar-menawar.
8. *Citizen control* (kontrol warga negara), yang merupakan tingkatan partisipasi terakhir dimana masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program dan kelembagaan sepenuhnya diberikan kepada mereka.



Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein

Delapan tangga tersebut terbagi lagi ke dalam tiga level derajat partisipasi (Gambar 1). Tiga level derajat partisipasi tersebut secara detail adalah sebagai berikut:

1. Tangga pertama dan tangga kedua dalam tangga partisipasi Arnstein, termasuk ke dalam tingkat bukan partisipasi sesungguhnya (*non-participation*), di mana tujuannya bukan untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, tetapi hanya membuat pemegang kekuasaan dapat “mendidik” atau “menyembuhkan” masyarakat.
2. Tangga ketiga sampai tangga kelima, termasuk ke dalam tingkat tokenisme (*tokenism*) atau partisipasi semu di mana masyarakat mendapatkan informasi dan dapat memberikan ide, tetapi ide yang diberikan tersebut belum tentu mempengaruhi jalannya program.
3. Tiga tangga teratas, yaitu tangga keenam sampai tangga kedelapan, termasuk ke dalam level kekuasaan warga negara (*citizen power*). Di mana dalam tingkat teratas ini, masyarakat sudah memiliki kontrol penuh atas berjalannya suatu program.

B. Pemuda

Terdapat banyak defenisi mengenai pemuda, menurut Abdullah (1974)

pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Sedangkan (2000) berpendapat pemuda merupakan suatu generasi yang



dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Perserikatan Bangsa-bangsa mengategorikan pemuda berumur antara 15-24 tahun. Sejumlah negara di Asia menggunakan batas umur yang berbeda untuk mendefinisikan pemuda: hingga berumur 25 tahun di Thailand, hingga berusia 30 tahun di India, Vietnam dan Papua New Guinea sementara di Malaysia hingga berumur 40 tahun (Naafs and White; 2012) dalam Azca dan Rahardianto (2012).

C. Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016, tentang Perhutanan Sosial, mendefinisikan Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Lindung.



Kartasubrata (1986) seperti yang dikutip oleh Yuliasih dan Sihaloho (2018) memandang bahwa Perhutanan Sosial, Kehutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan sebagai padanan kata dengan istilah *social forestry*. Selanjutnya Yuliasih dan Sihaloho (2018) mengemukakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (sebagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja, dilahan milik pribadi, umum atau Kawasan hutan yang diijinkan.

Menurut CIFOR (2003) dalam Yuliasih dan Sihaloho (2018), perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, tujuan produksi yang lestari.

D. Hutan Kemasyarakatan

Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat yang berada di desa-desa sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, pemanfaatan hutan secara legal salah satunya melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm), menurut Aji, *et al.* (2015), program HKm merupakan bentuk pemberian akses kepada penduduk di desa-desa sekitar hutan terhadap sumber daya hutan serta mendudukan peran para pemangku kenangtungan pada posisi penting.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016, tentang Perhutanan Sosial,



mendefinisikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Menurut Purnamasari *et al.* (2005) yang dikutip oleh Yuliasih dan Sihalo (2018), pemanfaatan hutan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat secara langsung dalam bentuk material (tangible) semata, seperti bambu, kayu, minyak, getah, tanah dan sebagainya.
2. Manfaat secara tidak langsung seperti pemanfaatan hutan dalam bentuk immaterial atau pemanfaatan jasa lingkungan bisa dalam bentuk wisata alam, pelestarian lingkungan yang mengacu pada prinsip ekologi yang dapat dijadikan alternatif untuk mendukung pembangunan negara jangka panjang.

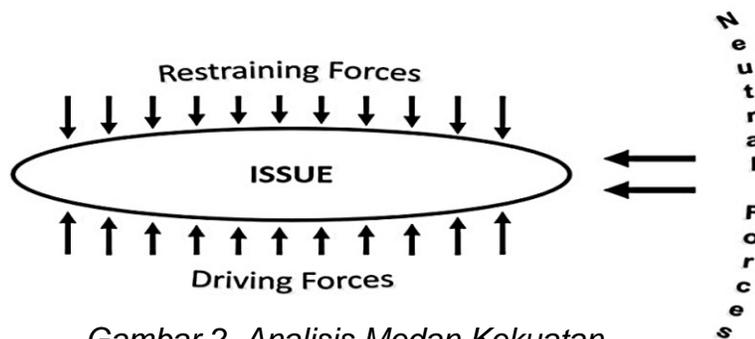
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, menjelaskan maksud dan tujuan dari HKm adalah sebagai berikut, Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan



E. Force Field Analysis.

Forces Field Analysis dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi (Nurhikmah, 2018). Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.

FFA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab serta pemecahan dari suatu masalah. FFA berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan Pendorong dan menetralkan kekuatan yang menolak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Analisis Medan Kekuatan



F. Penelitian Terdahulu

Setelah penyusun melakukan studi pustaka dengan segala keterbatasannya, penulis menyimpulkan hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian secara khusus mengenai Peran Pemuda dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba. Namun, beberapa penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Adi Winata dan Ernik Yuliana	Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani – 2012	Analisi deskriptif dan regresi berganda.	Tingkat partisipasi petani hutan dalam perencanaan program masih rendah, pelaksanaan program termasuk kedalam kategori sedang dan dalam evaluasi program masih rendah.
2	Raden Mohamad Mulyadin, Surati dan Kuncoro Ariawan	Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta - 2016	Kuantitatif dan deskriptif kualitatif.	Kegiatan HKm dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani di sekitar hutan, terutama pengaturan komposisi antara tanaman pokok dengan tanaman sela, luasan HKm dan jumlah anggota KTHKm.
3	Nurhikmah	Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. - 2018	Deskriptif dengan metode Force Field Analysis (FFA) dan Analysis Hierarki Process (AHP)	Pemberdayaan masyarakat HKm berhasil dengan skoring 2,3. Strategi yang sesuai terdiri atas: peningkatan pengetahuan dan kesadaran kelompok tani terkait kebijakan, fungsi, dan manfaat HKm, penetapan areal penggembalaan di dalam wilayah hutan kemasyarakatan, penguatan aturan formal internal kelompok, pengembangan kegiatan sekolah lapang dan studi banding, penambahan jumlah alat ekonomi produktif, pelatihan secara menyeluruh terhadap anggota, peningkatan daya saing hasil hutan dengan sistem



No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				pemasaran dan distribusi produk yang jelas dengan mitra, dan pelaksanaan monitoring evaluasi secara berkala.
4	Yanto Rochmayanto, Dodi Frianto & Edi Nurrohman	Analisis Partisipasi pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Koto Panjang, Riau) - 2006	Analisis Kualitatif	Terdapat 2 bentuk partisipasi masyarakat Desa Tanjung dan Tanjung Alai dalam program Hutan Kemasyarakatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan /pemikiran dan jasa/tenaga. Keduanya diberikan pada 3 tahap pembangunan HKm, yakni: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi masyarakat relatif rendah dalam bentuk pemikiran pada tahap perencanaan dan pemantauan HKm. Sedangkan pada tahap pelaksanaan HKm partisipasi masyarakat relatif tinggi dengan keterlibatan dalam bentuk jasa/tenaga.



No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
5	Nala Sari Tanjung, Dwi Sadono dan Cahyono Tri Wibowo	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat - 2017	Survey Ekplanatif	Anggota masyarakat pengelola di Hutan Nagari Sungai Buluh cukup berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Nagari, sedangkan di Hutan Nagari Paru kurang berpartisipasi. Kurangnya keikutsertaan anggota masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari terjadi karena anggota masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan
6.	Idah Rosida	Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa (Studi di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DIY - 2014	Deskriptif kualitatif	Partisipasi pemuda dalam mengembangkan potensi desa berupa Gunung Api Purba Nglanggeran menjadi kawasan Ekowisata dapat dikatakan aktif. Pemuda yang tergabung sebagai pengelola kawasan ekowisata telah berhasil membangun dan mengangkat citra desa pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional bahkan Internasional. Adapun bentuk partisipasi yang diberikan beraneka ragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Kesemua bentuk partisipasi tersebut disatukan dalam program pengembangan kawasan ekowisata yang terlaksana menjadi paket wisata hingga saat ini.



No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
7.	Prasaja, Lilik, and Muhamad Saryani.	Partisipasi Pemuda Pada Wisata Alam Kalibiru - 2018	Penelitian campuran (mixed methods) dengan penekanan pada aspek kuantitatif	Partisipasi pemuda ada pada tingkatan placation (tingkat 5 – degree of tokenism). Kesenjangan ini ditunjukkan oleh posisi pemuda dalam pengelolaan yang masih di bawah generasi yang lebih tua

